



JGC IX (1) (2020)

JURNAL GLOBAL CITIZEN

JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/...>

Diterima : 16-03-2020, Disetujui : 21-04-2020, Dipublikasikan:
1-07-2020



KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMENUHAN GURU PRODUKTIF SMK DI ERA SENTRALISASI PENDIDIKAN

¹Wahyu Noviansyah, ²A.G.Thamrin, ³Rima Sri Agustin, ⁴Itok Dwi Kurniawan

E-mail: wahyunoviansyah@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan jumlah SMK dengan target rasio SMA dan SMK sebesar 70:30 membawa implikasi pada peningkatan kebutuhan guru produktif SMK. Kebutuhan guru perlu dipenuhi secara efektif dan efisien. Keunikan system sentralisasi pendidikan dengan pengelolaan yang terpusat dapat dijadikan referensi dalam membentuk skema pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK. Tujuan penelitian ini untuk menggali dan mendeskripsikan skemapemenuhan guru produktif SMK di era sentralisasi pendidikan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga skema pemenuhan guru produktif SMK di era sentralisasi, antara lain melalui: (1) Program D III Guru Kejuruan; (2) Program Tunjangan Ikatan Dinas (TID); (3) Program Seleksi CPNS.

Kata Kunci : *Rekrutmen, Guru Produktif, Sentralisasi Pendidikan*

ABSTRACT

The Government's policy to increase the number of SMKs with a target ratio of SMA and SMK of 70:30 has implications for increasing the needs of vocational productive teachers. Teacher needs need to be met effectively and efficiently. The uniqueness of the centralized system of education with centralized management can be used as a reference in forming schemes to meet the needs of vocational productive teachers. The purpose of this study is to explore and describe the scheme of fulfilling vocational school teachers in the era of centralized education. This type of research is a qualitative case study type. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results showed that there were three schemes of fulfilling vocational productive teachers in the centralized era, including through: (1) D III Vocational Teacher Program; (2) Service Bonds Benefit Program (TID); (3) CPNS Selection Program.

Keyword : *Recruitment, Productive Teachers, Educational Centralization*

PENDAHULUAN

Peran pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia unggul tidak lepas dari campur tangan seorang guru sebagai agen pembelajaran. Guru adalah aktor utama yang memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada keberhasilan guru pada proses pembelajaran. Dengandemikian, kualitas guru menjadikomponenpentingdalam mencapaitujuan pembelajaran yang berkualitas.

Guru yang berkualitas dihasilkan dari proses rekrutmen yang berkualitas (Kompas, 19 Oktober2016). Proses rekrutmen guru perlu mengedepankanprinsip profesionalitas, objektivitas, transparan dan akuntabelsertamenolak praktik KorupsiKolusidanNepotisme (KKN). Kegiatanrekrutmen guru produktif SMK denganprinsip-prinsipdemikiandiharapkan dapat dihasilkan guru produktif yang berkualitas. Guru yang berkualitasdengan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dunia pendidikan kejuruan.

Rekrutmen guru produktif SMK adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan guru produktif SMK agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Saat ini kebutuhan guru produktif SMK mencapai angka 91.861 orang (Kompas, 19 Oktober 2016). Kekurangan guru produktif untuk SMK Negeri berjumlah 41.861 orang dan SMK Swasta berjumlah 50.000 orang. Adapun jumlah kebutuhan guru berdasarkan kompetensi keahlian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Kebutuhan Guru Produktif SMK

No	Kompetensi Keahlian
	Jumlah Kebutuhan
1	Teknik Komputer Jaringan (TKJ)

	6.381
2	Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 3.589
3	Agribisnis tanaman pangan dan holtikultura 2.132
4	Akomodasi Perhotelan 1.266
5	Agrobisnis tanaman perkebunan 1.091

(Sumber: Kompas, 19 Oktober 2016)

Peningkatan kebutuhan guru disebabkan berbagai faktor. Faktor pertama dampak dari kebijakan peningkatan jumlah SMK yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan guru produktif SMK. Faktor kedua adanya guru yang memasuki masa pensiun sehingga perlu adanya regenerasi. Faktor ketiga adanya guru yang berhalangan tetap seperti: meninggal dunia dan berpindah tugas sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi di sekolah.

Sentralisasi pendidikan merupakan suatu system birokrasi dimana Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan. Keunikan itu terletak pada kewenangan penuh yang dimiliki Pemerintah Pusat dalam mengatur system birokrasi sampai pada pengambilan kebijakan. Sejalan dengan Dela A. K, Eko Wulandari, dkk. (2019), bahwa Sistem sentralisasi pendidikan membuat pengelolaan guru dilakukansecaraterpusat, termasukpadasistem rekrutmen guru produktif SMK. Kegiatanrekrutmen sangat bergantung pada instruksi dan kebijakan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah termasuk Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan dalam mengatur manajemen dan pengelolaan guru. Manajemen guru dikelola secara terpusat dengan memperhatikan prinsip hirarki birokrasi sehingga pengelolaan guru jauh dari pengaruh praktik politik praktis Kepala

Daerah seperti yang terjadi di era otonomi daerah.

Berdasarkan paparan tersebut maka artikel ini bertujuan untuk menggalit tentang bagaimana proses rekrutmen guru produktif SMK di era sentralisasi pendidikan sehingga dapat dijadikan rekomendasi dan refleksi bagi *stakeholder* pendidikan dalam membangun kemampuan memenuhi guru produktif SMK di era desentralisasi pendidikan.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pola rekrutmen guru produktif SMK di era sentralisasi pendidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi guru produktif SMK yang memulainya sebagai guru di era sentralisasi pendidikan. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rekrutmen guru produktif SMK di era sentralisasi pendidikan, meliputi: (1) kependidikan; (3) SK CPNS; (3) nota pelaksanaan tugas dari Ditjenjur Depdikbud.

REKRUTEMEN GURU PRODUKTIF

Rekrutmen adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk melakukan identifikasi dan memikat pegawai yang potensial (*qualified*) (Kaswan, 2012: 67). Maisah (2013: 60) menjelaskan bahwa “rekrutmen merupakan proses dalam manajemen pengadaan pegawai yang berupaya mencari dan memikat pegawai yang mampu dan tertarik untuk melamar pekerjaan guna mengisi lowongan...”.

Pendapat lain diungkapkan oleh Sugiyono (2002: 80) bahwa “rekrutmen diartikan sebagai upaya untuk mencari sejumlah calon pelamar pegawai yang

sesuai dengan kebutuhan lembaga”. Jadi dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk mencari, memikat dan mendapatkan sejumlah tenaga kerja yang potensial guna mengisi kekosongan suatu posisi/jabatan tertentu yang diidentifikasi melalui perencanaan kepegawaian.

Guru produktif SMK adalah guru yang menguasai mata pelajaran produktif sesuai program keahlian sebagai bekal keterampilan untuk memasuki dunia kerja. Dari definisi rekrutmen dan guru produktif SMK maka dapat ditarik satu definisi bahwa rekrutmen guru produktif SMK adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencari, memikat dan mendapatkan sejumlah calon guru yang akan mengajar mata diklat produktif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Ada enam tahap dalam proses rekrutmen, antara lain: (1) Persiapan; (2) Pengumuman; (3) Penerimaan Lamaran; (4) Seleksi; (5) Penempatan; (6) Induksi atau orientasi

SENTRALISASI PENDIDIKAN

Istilah sentralisasi berasal kata sentral yang berarti pusat. Menurut Hasan Shadily (dalam Mambu, 2012) berpendapat, sentralisasi atau jugaseringkali dipakai istilah sentralisme adalah sistem politik dimana negara diseluruhannya di kendalikan dari satu titik pusat sebagai lawan dari sistem pemerintahan yang desentralisasi, federalisme, dan regionalisme, dimana satuan-satuan lokal (negara atau provinsi) mendapat tingkat otonomi tertentu.

Jadi, dalam konteks pemerintahan, yang dimaksud dengan sistem sentralisasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh pada penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada pengambilan keputusan terpusat pada satu titik.

Sistem pemerintahan dengan pola sentralisasi ini terjadi pada masa pemerintahan sebelum era otonomi daerah atau pada masa orde baru. Pemerintahan Orde Baru memiliki pola yang sentralistik, dimana kekuasaan berada pada level yang lebih tinggi dalam pemerintahan sehingga yang berada di level bawah harus patuh dan melaksanakan semua instruksi atau perintah dari level Pemerintahan di atas seperti budaya pada militer (Mufti: 2013).

Sentralisasi pendidikan adalah penyerahan kewenangan secara penuh kepada pemerintah pusat untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pembangunan di bidang pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Menurut Guitarezzhe (2011) menjelaskan bahwa pendidikan sentralistik adalah pendidikan yang sistem manajemennya masih berpusat pada Pemerintah (pusat). Konsep sentralisasi menekankan pemusatan pengurusan pendidikan. Artinya segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan diurus oleh organisasi pendidikan tingkat pusat. Kurikulum pendidikan, prasarana dan sarana pendidikan, ketenagaan pendidikan serta peraturan peraturannya didukungnya semua ditetapkan oleh pemerintah pusat. Daerah hanya sekedar menjalankan keputusan-keputusan yang berasal dari pusat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola rekrutmen guru produktif dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru secara nasional. Perhitungan kebutuhan guru dilakukan dari tingkat sekolah, kabupaten, provinsi sampai terkumpulnya data kebutuhan guru produktif secara nasional. Kemudian Pemerintah pusat mengajukan usulan alokasi jumlah formasi guru pada Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) menetapkan jumlah formasi untuk guru yang disesuaikan dengan

kemampuan negara pada masing-masing daerah. Pelaksanaan kegiatan pangajuan dan penetapan jumlah formasi dilakukan setiap tahunnya.

Pemenuhan formasi guru produktif dilakukan melalui 3 jenis pengangkatan CPNS, antara lain: Program D III Guru Kejuruan, Program Tunjangan Ikatan Dinas (TID) dan Program Seleksi CPNS.

Program D III Guru Kejuruan

Program D III Guru Kejuruan Teknologi merupakan program yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan yang bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPGT) dan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Tujuan diadakannya Program D III GKT ini untuk menghasilkan guru praktek (*vocational instructors*).

Pelaksanaan rekrutmen guru produktif SMK Negeri. melalui program D III GKT didasarkan pada :

- 1) Keputusan Mendikbud tanggal 12 Mei 1980 nomor: 0161/U/1980 tentang Penataran Tipe B.
- 2) Rapat Kerja antara Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dengan Dirbinsar tanggal 12-13 Juni 1980.
- 3) Instruksi Dirjen Dikdasmen nomor: 122/C4/I/1980 tanggal 15 September 1980.
- 4) Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 14 Januari 1984 nomor: 004/cAep/1.84
- 5) Kepmendikbud tanggal 9 Maret 1984 nomor: 068/U/1984.

PPPGT bekerja sama dengan Sekolah Teknik Menengah (STM) untuk menjaring lulusannya. Peserta mendaftar melalui sekolah dengan melengkapi persyaratan administrasi, seperti : rapor STM, data pribadi, SKKB dan lain-lain. Kemudian mengikuti tes tertulis. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi mendapatkan surat jalan dari STM untuk menempuh pendidikan dan pelatihan di PPPGT yang ada di Bandung, Malang dan Medan. Untuk peserta yang berasal dari daerah Jawa Timur, Maluku, Papua, NTT,

NTB dan Timor-timor menempuh pendidikan dan pelatihan di PPPGT Malang. Dari daerah Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi ditempatkan di PPPGT Bandung dan yang berasal dari Sumatera serta sebagian dari Kalimantan di tempatkan di PPPGT Medan. Khusus keahlian teknik gambar mesin, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilakukan di Politeknik ITB Bandung.

Mahasiswa Program D III Guru Kejuruan Teknologi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu *pre-service training* dan *in-service training*. *pre-service training* diperuntukkan bagi mereka yang non pegawai negeri dengan jenjang umur maksimal 28 tahun dan mendapatkan fasilitas biaya pendidikan dan uang saku setiap bulannya. Sedangkan, untuk *in-service training* diperuntukkan bagi mereka yang sudah pegawai negeri dengan jenjang umur maksimal 50 tahun dan ditambah dengan pengalaman kerja serta mendapatkan fasilitas asrama dan makan tetapi tidak mendapatkan uang saku bulanan.

Pasca menyelesaikan pendidikan dengan jenjang Diploma III, para mahasiswa melaksanakan penugasan sebagai tenaga edukatif pada STM yang mengajukan saat pendaftaran setelah mendapatkan surat tugas dari Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (Ditdikmenjur) dan SK CPNS. Kemudian melaksanakan tugas mengajar selama masa percobaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Program Tunjangan Ikatan Dinas (TID)

Program ini terselenggara atas kerja sama antara Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dengan LPTK, yaitu IKIP Jogjakarta dan IKIP Padang yang ditunjuk sebagai Perguruan Tinggi penyelenggara Program Tunjangan Ikatan Dinas. Program Tunjangan Ikatan Dinas bagi mahasiswa calon guru STM ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan guru STM seluruh Indonesia

atas bantuan dari Bank Dnnia (*World Bank*). Program utamadari bantuan Bank Duniake IV untuk FKT IKIP Yogyakarta dan Padang adalah dalam rangka menyiapkan guru-guru yang terampil dalam mengajar praktek di laboratorium dan bengkel untuk STM.

Program Tunjangan Ikatan Dinas untuk lulusan LPTK (IKIP Jogja dan Padang) itu ditetapkan oleh Pemerintah sebanyak 3 angkatan dengan harapan bahwa jumlah lulusan sebanyak 3 angkatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan akan guru produktif SMK di seluruh Indonesia dan lulusan LPTK yang ditetapkan pada Program TID tersebut bersedia untuk ditempatkan pada sekolah di seluruh pelosok tanah air yang kekurangan guru produktif.

Proses rekrutmen guru dengan Program Ikatan Dinas ini dilakukan oleh LPTK atau Perguruan Tinggi penyelenggara melalui jalur SIPENMARU dan PMDK. Pada jalur SIPENMARU calon mahasiswa langsung mendaftar pada Perguruan Tinggi penyelenggara dengan melengkapi berkas persyaratan administrasi. Untuk calon mahasiswa jalur PMDK mereka mendaftar pada Perguruan Tinggi penyelenggara ikatan dinas melalui pengajuan pihak sekolah.

Para mahasiswa peserta Program TID diwajibkan untuk menandatangani perjanjian ikatan dinas dan bersedia ditempatkan secara nasional. Peserta Program TID yang melanggar perjanjian, akan diberi sanksi serta diwajibkan untuk mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pasca menyelesaikan pendidikan di IKIP Jogja dan Padang, peserta mendapatkan surat tugas dari Ditdikmenjur Pusat dan SK CPNS sebagai tenaga edukatif. Kemudian melaksanakan penugasan di wilayah NKRI. Untuk lulusan IKIP Padang, penugasan di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan penugasan untuk lulusan IKIP Jogja di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Timor-timor dan Papua.

Kemudian melaksanakan tugas mengajar pada masa percobaan CPNS dan diangkat menjadi PNS setelah lulus prajabatan.

Program Seleksi CPNS

Salah satu upaya Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan kebutuhan guru produktif dilakukan dengan mengangkat CPNS melalui seleksi CPNS. Rekrutmen guru produktif melalui seleksi CPNS diatur sepenuhnya oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, baik yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan maupun alokasi jumlah formasi yang dibutuhkan, sedangkan pelaksanaan rekrutmen dapat melalui Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Tingkat Provinsi yang berkoordinasi dengan Depdikbud Kabupaten/Kota.

Proses pelaksanaan rekrutmen guru produktif melalui seleksi CPNS, dimulai dari penyebaran informasi kepada para pelamar atau calon guru produktif SMK. Penyebaran informasi melalui media pengumuman tempel di Depnaker, sekolah dan juga melalui media masa.

Kemudian para pelamar mendaftar langsung ke panitia dengan melengkapi persyaratan administrasi seperti : fotokopi ijazah, data pribadi, SKKB, kartu kuning dari Depnaker dan lain-lain ke panitia penyelenggara. Setelah berkas administratif dinyatakan lengkap, maka selanjutnya peserta melaksanakan tes tertulis sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Dari hasil seleksi tes tertulis, peserta yang dinyatakan lolos seleksi, selanjutnya mengikuti tes wawancara dan tes kesehatan. Kemudian setelah melalui proses tes wawancara dan tes kesehatan, peserta yang lolos melakukan pemberkasan CPNS. Setelah itu, berkas disetujui oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Kemudian dari persetujuan BAKN tersebut Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan menerbitkan SK CPNS.

Untuk peserta yang sudah mendapatkan SK CPNS dapat menempatkan diri di sekolah yang ditunjuk sesuai dengan SK CPNS dan

melaksanakan tugas mengajar sebagai guru selama masa percobaan CPNS. Kemudian diangkat menjadi Pegawai negeri Sipil (PNS) setelah lulus diklat prajabatan.

Kelebihan dan Kekurangan

Pada pola rekrutmen guru produktif SMK di era sentralisasi pendidikan beberapa kelebihan dan kekurangan yang menjadi bahan refleksi, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan

N	Kelebihan	Kekurangan
1	Pendistribusian guru lebih merata di setiap daerah	Pengurusan administrasi terlalu jauh dan panjang alur birokrasi yang sehinggalah tidak efisien
2	Mobilisasi guru dari satu daerah ke daerah lain lebih mudah	Tidak adanya proses orientasi guru baru
3	Terdapat kesempatan untuk mengajar dan materi lebih baik dari pada sebelumnya	Tingkat pengawasan Pemerintah pusat terhadap daerah cenderung kurang mengkomodifikasi dan keunikan daerah
4	Manajemen dan pengelolaan guru tidak terkontaminasi oleh praktik politik daerah	Manajemen guru mengikuti struktur hirarki birokrasi yang berwenang mengurus urusan pendidikan (Depdikbud) dari pusat hingga Kepala Daerah tidak dapat melakukan intervensi

SIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 3 jenis pola rekrutmen guru produktif SMK pada era sentralisasi pendidikan,

yaitu: pola rekrutmen melalui program D III Guru Kejuruan Teknologi, program Tunjangan Ikatan Dinas (TID) dan program Seleksi CPNS.

Kelebihan pola rekrutmen guru produktif di era sentralisasi pendidikan antara lain:

1. Pendistribusian guru lebih merata di setiap daerah
2. Mobilisasi guru dari satu daerah ke daerah lain lebih mudah
3. Terdapat kesempatan mengajarnya terdapat di berbagai daerah
4. Manajemen dan pengelolaan guru tidak terkontaminasi oleh praktik politik daerah

Kekurangan pola rekrutmen guru produktif SMK di era sentralisasi pendidikan, antara lain:

1. Pengurusan administrasi terlalu jauh dan anjangan birokrasi yang menghambat efisiensi
2. Tidak adanya proses orientasi guru baru
3. Tingkat pengawasan Pemerintah Pusat terhadap daerah kurang cenderung kurang mengkomunikasikan kondisi dan keunikan daerah
4. Manajemen guru mengikut struktur hirarki birokrasi yang berwenang mengurus urusan pendidikan (Depdikbud) dari pusat hingga daerah sehingga Kepala Daerah tidak dapat melakukan intervensi

DAFTAR RUJUKAN

Arif, A. (2012). Kajian Pola Kebijakan Pendidikan 70:30. Diperoleh 17 April 2014 dari <http://edukasi.kompasiana.com/2012/02/24/kajian-pola-kebijakan-pendidikan-7030-prospek-pengembangan-smk-di-kabupaten-rokan-hulu-441670.html>

Dela A. K, Eko Wulandari, dkk. (2019). Pentingnya Komunikasi Sosial Budaya Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Nilai Pancasila. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 6 (2). pp. 62-71

Guitarezzhe, N. (2011). *Paradigma Pendidikan Indonesia Perspektif Manajemen Pendidikan*. Diperoleh 26 Februari 2014 dari <http://blog.umy.ac.id/yaharisadoank/>

2011/11/14/paradigma-pendidikan-indonesia-perspektif-manajemen-pendidikan/

Indonesia Kekurangan 91.861 Guru Produktif. (19 Oktober 2016). Kompas. Hlm 1

Kaswan. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Keunggulan Bersaing Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Maisah. (2013). *Manajemen Pendidikan*. Ciputat: Gaung Persada Press Group

Mufti. (2013). *Kekuatan Politik Di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Sugiyono. (2002). *Manajemen Diklat*. Bandung: Alfabeta